

PELAKSANAAN KOORDINASI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM PEMBERIAN IZIN DI BIDANG KESEHATAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN KETAPANG

Oleh:
SAFITRI MASYITAH
NIM. E42012044

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pontianak Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksud untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi antar aparatur pemerintahan dalam efektivitas pelayanan perizinan di bidang kesehatan di Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini diambil berdasarkan permasalahan koordinasi antar aparatur pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pemberian perizinan yang masih belum optimal di Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Tripathi dan Reddy. Hasil penelitian ini menemukan bahwa belum optimalnya koordinasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kontinuitas yang berjalan kurang lancar, organisasi yang tidak sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang kurang jelas, komunikasi yang jarang dilakukan dan perlunya ketegasan dari seorang pemimpin koordinasi.

Kata-kata Kunci : Koordinasi, Aparatur Pemerintah, Pelayanan

Abstract

The aim of writing this essay to acknowledge and analyze coordinating among government personnel in the effectiveness of the licencing service in the health sector in the Ketapang regency. The title of this essay is derived based problem of coordination among government officials in improving service provision license is still not optimal in Ketapang regency. This research used descriptive analysis with qualitative method. The theory that is used in this research is Tripathi and Reddy. Conclusions of this study is not optimal coordination caused by factors that continuity running less smoothy, the organition is not simple, formulation authority, lock of communication, responsibility is less clear or done, communication is rarely done and need for corndination firmes of leader.

Keywords : Coordination, Apparatus of government, Service

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan kebutuhan pembangunan pada era berkembang, sangat diperlukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, koordinasi memiliki peran dan mempunyai arti yang sangat penting terutama di antara aparatur pemerintahan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari pelayanan publik mempunyai sifat antar sektor yang mempunyai sifat pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu aparatur pemerintah instansi yang bersangkutan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara unsur aparatur pemerintahan, diharapkan akan lebih terjamin pencapaian tujuan pemerintahan secara keseluruhan dengan cara yang berdayaguna dan berhasilguna. Program pemerintah dalam pelayanan publik akan selalu berkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, salah satunya yaitu pelayanan publik mengenai Izin di Bidang Kesehatan.

Saat ini pelayanan yang diberikan oleh pemerintah masih belum maksimal dikarenakan masih ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan yang

mereka dapatkan pada saat proses memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu Pemerintah Kabupaten Ketapang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 tahun 2008 tentang pembentukan Kantor Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Tugas pokok Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang adalah membantu Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Ketapang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan dan pemberian Izin di Bidang Kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tempat praktek kesehatan seperti :

1. Tempat Praktek Dokter
2. Tempat Praktek Bidan
3. Tempat Praktek Pengobatan Tradisional
4. Tempat Operasi Optik
5. Tempat Klinik Bersalin
6. Tempat Praktek Perawat Umum
7. Tempat Praktek Perawat Gigi
8. Tempat Toko Obat

9. Tempat Izin Baali Pengobatan Swasta

10. Tempat Laboratorium Swasta

11. Praktek Dokter Berkelompok

12. Tempat Klinik Toko Obat

Pada kenyataannya masih ada yang belum memiliki surat perizinan kesehatan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat (Tenaga Medis) terhadap pentingnya dan prosedur pembuatan Izin di Bidang Kesehatan maupun realisasi dalam izin tersebut yang tidak dapat diproses tepat pada waktunya. Tidak maksimal terealisasinya penerbitan Izin di bidang kesehatan ini salah satunya disebabkan oleh pejabat teknis yang berwenang tidak berada ditempat.

Sehubungan dengan belum terealisasinya permohonan Izin di bidang kesehatan dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan yang maksimal dari penyelenggaraan pelayanan yaitu aparatur pemerintah di KPTSP dan dinas Kesehatan di Kabupaten Ketapang. Permasalahan yang ditemui yaitu terdapatnya keluhan yang dirasakan masyarakat (Tenaga Medis) dalam mengurus permohonan Izin di bidang kesehatan antara lain pemberian izin tersebut cenderung membutuhkan proses

mekanisme yang panjang, sehingga memakan waktu yang lama.

Dampak pelayanan yang kurang maksimal tersebut mempengaruhi persepsi dan kesadaran masyarakat (tenaga medis) di Kabupaten Ketapang untuk mengajukan izin di bidang kesehatan jika ingin mendirikan tempat praktek kesehatan. Ini juga dapat dilihat dari data awal jumlah izin di bidang kesehatan 3 tahun terakhir yaitu: Tahun 2012 sebanyak 65, Tahun 2013 sebanyak 56 dan Tahun 2014 sebanyak 43. Ini artinya mempengaruhi kesadaran masyarakat (tenaga medis), karena menganggap izin di bidang kesehatan belum menjadi persyaratan penting dalam tempat praktek kesehatan.

Ada persyaratan pembuatan Izin di bidang kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemohon (Sumber:Draf SOP Perizinan KPT Kabupaten Ketapang, Tahun 2015), yaitu :

1. Surat Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi:

- 1) Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
- 2) Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan

kesehatan sebagai tempat
praktiknya;

- 3) Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu;
- 4) Surat Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik;
- 5) Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

2. Surat Izin Praktik Internsip:

1. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) untuk kewenangan yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
2. Surat Keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia;
3. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik;
4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

2. Fokus Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada permasalahan Koordinasi eksternal Aparatur Pemerintah Dalam Pemberian Izin di Bidang Kesehatan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan oleh penulis untuk menjawab permasalahan penelitian adalah sebagai berikut : Bagaimana Koordinasi eksternal Aparatur Pemerintah dalam pemberian Izin di Bidang Kesehatan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang ?

4. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat tujuan mengapa penelitian itu dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Koordinasi Eksternal Aparatur Pemerintah pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kesehatan dalam pemberian Izin di Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang.

5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mendalami ilmu dalam pengkajian khususnya ilmu manajemen pemerintahan. Selain itu penelitian ini nantinya diharapkan mampu member kontribusi di bidang studi tentang koordinasi. Manfaat lain dari penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi penelitian baru atau penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dimana penelitian ini dilakukan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Serta dapat memberi sumbangan pikiran atau gagasan agar tercipta koordinasi yang baik di institusi terkait dan pelayanan Izin dibidang Kesehatan berjalan dengan baik demi perencanaan pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Faktor-faktor koordinasi menurut Tripathi dan Reddy (Moekijat 2006: 39) ada 9 (Sembilan) faktor-faktor mencapai koordinasi yang efektif, yakni :

1. Hubungan langgeng

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung di antara orang-orang yang bertanggung jawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham, apabila ada dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

2. Kesempatan Awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijakan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri harus ada konsultasi bersama. Dengan cara demikian tugas penyesuaian dan penyatuan proses pelaksanaan rencana menjadi lebih mudah.

3. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.

Oleh karena koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama organisasi melaksanakan fungsinya.

4. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan yang baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain, koordinasi jangan sampai kaku. Koordinasi ini akan meredakan masalah-masalah apabila timbul koordinasi yang baik sekali akan mengetahui secara dini dan mencegah kejadiannya.

5. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu organisasi. Pimpinan harus diberitahu tentang tujuan organisasi dan diminta agar bekerja untuk tujuan bersama. Suatu tujuan yang jelas dan diberitahukan secara efektif kepada kepala-kepala bagian dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan.

6. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian yang dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi di antara bagian-bagian di antara kepala-kepala bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi yang erat

berhubungan dapat ditempatkan dibawah seseorang pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi.

7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai –pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas membantu pimpinan dalam memelihara orang-orang bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan-pembatasan.

8. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik, terjadinya saling tukar informasi secara terus-menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-program untuk waktu yang akan mendatang. Terjadinya komunikasi yang efektif, tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan

organisasi dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis menuju kepelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

9. Kepemimpinan dan supervise yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisenya. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Pemimpin yang efektif membuat kepercayaan kepada orang-orang bawahan dan juga memelihara semangat kerja mereka. Sesungguhnya, kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada metode lain yang menggantikannya.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan berdasarkan paradigma kualitatif. Dimana dalam penelitian ini menggambarkan keadaan atau fenomena secara mendalam mengenai Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pemerintahan Dalam Pemberian Izin Di Bidang Kesehatan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Ketapang. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan alat dokumentasi. Teknik analisis data terdiri

dari beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ialah di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Subjek penelitian ialah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Penanggung Jawab Koordinasi), Kasi Perizinan Dan Non Perizinan (Pengelola Kegiatan), Staff Perizinan dan non perizinan, Kasi YanKes dan staff YanKes.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu atau berkesinambungan, tidak hanya berhenti pada tahap awal perencanaan saja dan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu koordinasi harus dilaksanakan secara terus menerus agar pelaksanaan koordinasi yang efektif yang hendak dicapai dapat terwujud.

2 Organisasi Yang Sederhana

Organisasi merupakan suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan dan pemeliharaan perserikatan anggota-anggota yang mempunyai hubungan kerja dan bekerja

sama dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang ada baik internal maupun eksternal. Dalam pemberian pelayanan perizinan di bidang kesehatan ini pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur anggota-anggota tim yang ada melalui penerapan pembagian kerja, pendelegasian wewenang dan koordinasi dalam bentuk struktur organisasi yang tertera dalam Perda Kabupaten Ketapang No. 12 tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Organisasi memiliki beberapa unsur yang pertama sebagai tempat untuk bekerja sama, artinya organisasi merupakan tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya organisasi setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerjasama. Unsur yang kedua yaitu proses kerja sama dua orang. Dalam praktek jika kerja sama dilakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu disusun harus lebih sempurna dengan kata lain proses kerja sama yang dilakukan akan menjadi lebih baik. Namun, semakin sederhana suatu organisasi maka akan semakin mempermudah berjalannya koordinasi.

3 Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab

Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas merupakan salah-satu faktor pendukung yang sangat penting dalam koordinasi tim pelaksana pelayanan perizinan. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas berhubungan erat dengan struktur organisasi, hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi harus menggambarkan penjabaran dari fungsi-fungsi tugas pokoknya. Oleh karena itu diperlukan penjabaran wewenang yang mengatur koordinasi antar tim yang melaksanakan pelayanan perizinan. Tanpa kewenangan tim dalam organisasi tidak dapat mengetahui apa tugas masing-masing tim tersebut. Dengan adanya wewenang yang sah dalam setiap tim dalam pelayanan perizinan ini dapat membantu agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang.

4 Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik, terjadinya saling tukar informasi secara terus-menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-program untuk waktu yang akan mendatang. Terjadinya komunikasi yang efektif, tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan

dengan tujuan-tujuan organisasi dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis menuju kepelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia saling Menurut Tripathi dan Reddy, komunikasi sangat menentukan dalam keberhasilan koordinasi suatu pelayanan. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu dengan yang lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat bekerja, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Koordinasi dalam sebuah pelayanan perizinan yang direncanakan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari komunikasi. Tanpa komunikasi yang diatur dengan baik, maka tidak mungkin koordinasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik.

5 Kepemimpinan

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisenya. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Pemimpin yang efektif membuat kepercayaan kepada orang-orang bawahan dan juga memelihara semangat kerja mereka. Sesungguhnya, kepemimpinan

yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada metode lain yang menggantikannya.

Dalam kehidupan organisasi tak terkecuali organisasi pemerintahan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepemimpinan memegang peranan penting di dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pimpinan tidak bekerja sendiri tetapi ia perlu bawahan atau orang lain diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. Dari definisi diatas jelas bahwa kepemimpinan yang baik akan mendorong suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama.

D. SIMPULAN

1. Kontinuitas

Bahwa kontinuitas koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang kesehatan belum berjalan secara optimal dikarenakan dari setiap tahapan pemberian perizinan KPTSP sebagai koordinator tidak selalu memberitahu ataupun mengingatkan

secara rutin dan berkala kepada seluruh tim pelaksanan kegiatan pelayanan perizinan sehingga masih ada bagian teknis yang tidak ada di tempat pelayanan terpadu / KPTSP.

2. Organisasi yang sederhana

Hasil penelitian mengungkapkan organisasi yang daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit. Dikarenakan terlalu banyak aparatur yang terlibat dalam pelayanan pemberian perizinan di bidang kesehatan yang terkait menyebabkan koordinasi menjadi lebih rumit.

3. Perumusan wewenang dan tanggung jawab

Bahwa anggota tim pelaksana pelayanan perizinan belum melaksanakan tupoksi dengan baik. Anggota tim pelaksana pelayanan perizinan hanya mengetahui secara umum wewenang dan tanggung jawab mereka tanpa berusaha melaksanakan tupoksi yang efektif dalam pemberian perizinan di bidang kesehatan. Aparatur hanya sekedar mengetahui lebih lanjut perumusan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) di dalam tim pelayanan pemberian perizinan namun mengenyampingkannya, karena masih memikirkan bahwa ada tugas pokok

lain yang lebih penting daripada pelayanan perizinan.

Pengertian dari tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang, oleh karena itu harus ada keterkaitan antara satu dengan yang lain dan antara wewenang dan tanggung jawab. Perumusan wewenang dan tanggung jawab ini dapat dilihat pada tugas, fungsi serta wewenang masing-masing jabatan.

4. Komunikasi

Bahwa kurangnya komunikasi yang dilakukan antar instansi maupun antar aparatur pemerintahan di KPTSP dan Dinas Kesehatan yang terkait di dalam pelayanan pemberian perizinan. Menimbang bahwa aparatur yang terlibat memiliki tugas masing-masing, jadi perlunya peran proaktif dari KPTSP.

5. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kurang optimal secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh KPTSP dengan Dinas Kesehatan, karena pada hakekatnya tanggung jawab

koordinasi sesungguhnya berada di tangan pimpinannya. Oleh karena itu, pimpinan tidak bekerja sendiri tetapi ia perlu bawahan atau orang lain yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. Itulah sebabnya pemimpin membutuhkan jiwa yang tegas untuk mengkoordinasikan bawahannya.

E. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang didapat oleh penulis, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :'

a. Kontinuitas

Perlu adanya koordinasi yang kontinu/berkelanjutan dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dalam pelayanan perizinan di bidang kesehatan.

b. Organisasi yang sederhana

Kebijakan di tiap instansi agar pemimpin menunjuk salah satu staf teknis yang bertugas untuk membantu pelayanan perizinan di bidang kesehatan sehingga pekerjaan bisa lebih terfokus menuju tujuan bersama.

c. Perumusan wewenang dan tanggung jawab

Hendaknya ada monitoring dan evaluasi mengenai wewenang dan tanggung jawab dari instansi terkait agar aparatur atau staff yang menangani pelayanan perizinan lebih memahami dan dapat bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang berlaku.

d. Komunikasi

Perlu diintensifkan komunikasi antara KPTSP dan Dinas Kesehatan dengan melakukan komunikasi sesering mungkin, dengan menggunakan komunikasi secara langsung diharapkan komunikasi yang efektif dapat terwujud dan perlu diadakan evaluasi rutin (forum koordinasi antar aparatur/ instansi).

e. Kepemimpinan

Perlu adanya ketegasan dari pemimpin atau kepala SKPD untuk selalu memonitoring perkembangan pelaksanaan pelayanan perizinan.

F. REFERENSI

Handayaniingrat, Soewarno. 2002.
Administrasi Pemerintah Dalam

Pembangunan Nasional. Jakarta : Haji Masagung
Jasfar, Farida. 2009. **Manajemen Jasa: Pendekatan Terpadu.** Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara. 2008. **Koordinasi dan Hubungan Kerja.** Jakarta: (Lembaga Administrasi Negara). Bandung: Mandar Maju

Manulang. 2005. **Dasar-Dasar Manajemen.** Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Muhammad, Arni. 2011. **Metode Penelitian Kualitatif.** Remaja Rosdakarya: Bandung.

Moekijat. 1994. **Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis).** Bandung: Mandar Maju.

Ndraha, Talizuduhu. 2011. **Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru 1.** Jakarta: RinekaCipta.

Reksohadipradja, Sukanto. 2000. **Dasar-dasar Manajemen.** Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta

Sugandha, Dan. 2000. **Koordinasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi.** Jakarta: Intermedia

Sutarto.2002. **Dasar-dasar Organisasi.** Yogyakarta: Gajah Mada University.

Suryabrata. 1983. **Metodologi Penelitian Manajemen.** Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Tohardi, Ahmad. 2008. **Petunjuk Praktis Menulis Skripsi,** Bandung: Mandar Maju
Syafiie, Inu Kencana. 2011. **Manajemen Pemerintahan.** Bandung: Pustaka Reka Cipta Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Skripsi :

Rikky. 2013 : **Koordinasi Tim Penata Kegiatan Pengolahan dan Pengusaha Sarang Burung Walet di Kota Singkawang.** Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Fajar Satrio, Fuaddianto. 2013. **Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak.** Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Yunita Claudy Larasatie. 2014. **Koordinasi Antar Instansi Dalam Penyelenggaraan Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pontianak tahun 2015.** Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Dokumen :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ketapang Tahun 2015.

Peraturan Perundang- Undangan

Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 32 tahun
2006 Tentang Pelimpahan Sebagian
Pelayanan di Bidang Perizinan Dan Non
Perizinan Kepada Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Ketapang





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HENNY PUSPITA
NIM / Periode lulus : E42010027/ 2014
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : Hennypuspita28@gmail.com/085387876047

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN DI DESA SUNGAI AWAN KIRI KABUPATEN KETAPAAANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

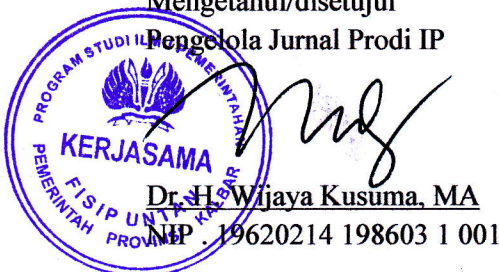
- ☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Prodi IP



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 20 Januari 2015

(HENNY PUSPITA)